# Peran Siskeudes dalam Pengawasan Keuangan Desa

Syaiful Hendry
Auditor Madya
Koordinator Pengawasan Akuntabilitas Pemerintah Daerah

**Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur**

Samarinda, 18 November 2026

# SEKTOR STRATEGIS PEMBANGUNAN DESA

**UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, dan**
**UU Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa**

**Tujuan Pembangunan Desa:**
***"Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penganggulanan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan."***

**Asta Cita/Prioritas Nasional 6**
***"Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan."***

**PHTC 3 dan PHTC 7**
***"Meningkatkan Produktivitas Pertanian Desa" dan "Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur Desa dan Kelurahan."***

**Intervensi Kebijakan/Program Pembangunan dan Pemberdayaan Desa**
***Kermendes dan PDT, Kemendagri, Pemda, Pemdes melalui APBN, APBD dan APBDes.***

## Kebijakan Dana Desa Tahun 2026

**Permendessa No 16 Tahun 2025 tentang**
**Fokus Penggunaan Dana Desa**

**Prioritas penggunaan Dana Desa meliputi penanganan kemiskinan ekstrem, peningkatan promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan skala desa, penguatan ketahanan iklim dan ketangguhan bencana, program ketahanan pangan atau lumbung pangan, energi, dan lembaga ekonomi desa lainnya, dukungan implementasi Koperasi Desa Merah Putih, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur desa melalui program Padat Karya Tunai Desa, pembangunan infrastruktur digital dan teknologi di desa, serta program sektor prioritas lainnya, termasuk pengembangan potensi dan keunggulan desa.**

## Pembangunan Desa

### Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa

- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa
- Penguatan dan Pembinaan BUMDes
- Pendaftaran (Indeks Desa) dan Desa Digital
- Tenaga pendamping Profesional Desa
- Pembinaan Supra Desa

### Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia

- Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pendidikan
- Pemenuhan Kebutuhan DesarKesehatan
- Pemenuhan Kebutuhan DasarAir Minum dan Sanitasi Aman
- Desa Berketahanan Iklim
- Pengelolaan Aset Desa

### Penanggulangan Kemiskinan

- Program BJT Desa
- Program Padat Karya Tunai
- Tenaga pendampingProfesional Desa

**APBN: DD, DAU, DAK** | **APBD PROVINSI: PBP, PBH** | **APBD KAB/KOTA: BKK, ADD** | **APBDes: PADes**



# BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP)

**BPKP merupakan aparat pengawasan intern pemerintah yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden**

## Visi

"Menjadi Auditor Presiden yang Andal dan Terpercaya dalam Rangka Mewujudkan Visi Misi Presiden."

## Misi

"Membantu Presiden dalam Menjaga Akuntabilitas Keuangan, Pembangunan, dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih."

## Tugas

Menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara dan daerah dalam pembangunan nasional.

## Peran Utama BPKP

### Sebagai APIP

- Pengawalan Pembangunan Nasional
- Pengamanan Aset Negara/Daerah
- Pengamanan Keuangan Negara/Daerah
- Peningkatan Tata Kelola

**SEBAGAI KOORDINATOR/PENGARAH PENGAWAS INTERNAL K/L/D/BUMN(D)**

## Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES)

| Implementasi | Output | *Siskeudes Online* |
|---|---|---|
| Nasional : 71.900 dari 75.265 desa (95,53%) | (APBDes, TUKDes, Lapkeu Desa) | Nasional : 230 pemda (64,82%)<br>Provinsi Kalimantan Timur: 841 Desa |

- Interkoneksi dengan OM-SPAN;
- Bahan konsolidasi data nasional;
- Pemantauan realisasi APBDes;
- Mempermudah tata kelola keuangan desa;
- Data akurat dan proses cepat;
- Database sebagai input aplikasi Siswasekudes.

cacm

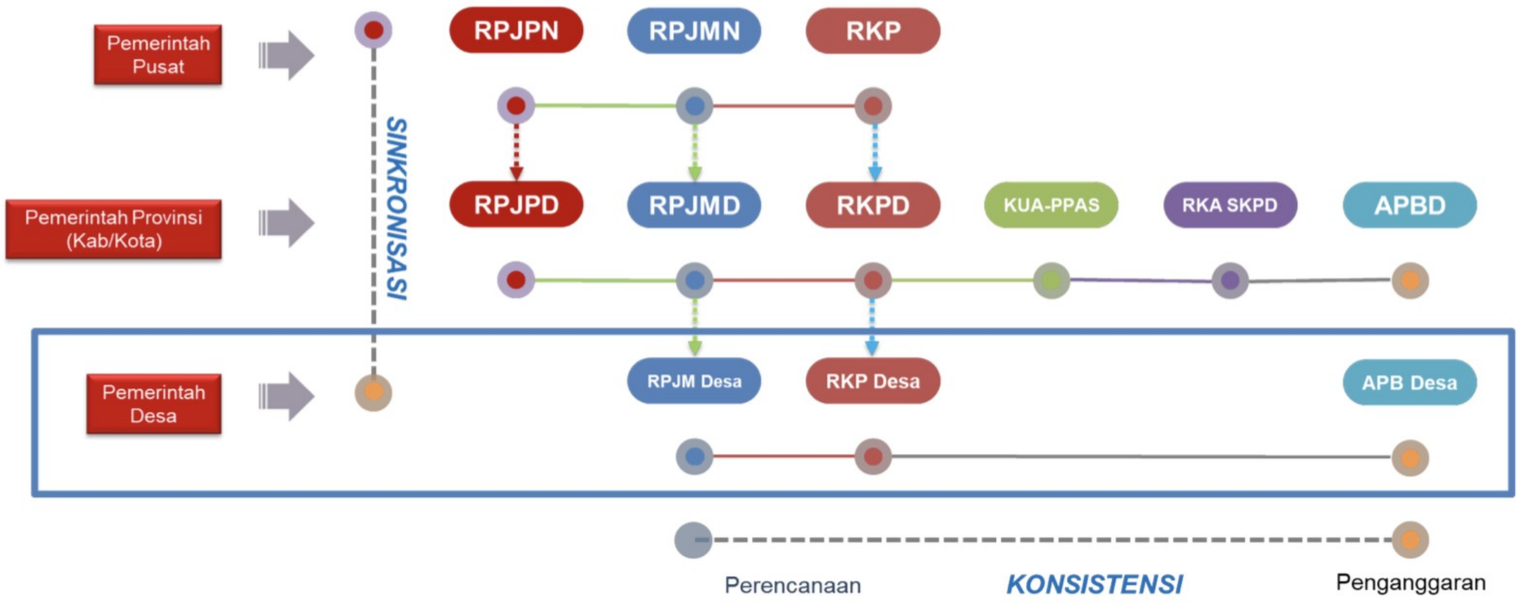
## Sistem Pengawasan Keuangan Desa (SISWASKEUDES)

- **Pengawasan desa berbasis risiko melalui pemeringkatan skor risiko desa dalam menentukan sampel audit;**
- Perintegrasi dengan database Siskuedes, Sipades dan GAGM, dan
- Beragam fitur disediakan dalam pelaksanaan audit berbasis TIK.

| *Assurance* | *Consulting* |
|---|---|
| Audit, Evaluasi, Reviu, Pemantauan | Asistensi, Bimtek |



# Sinkronisasi dan Konsistensi Perencanaan Pembangunan Pusat, Daerah dan Desa




a) **Pembangunan Daerah merupakan bagian integral dari Pembangunan nasional**
b) **Tujuan Pembangunan Daerah adalah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan Masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah.**
c) **Tujuan Pembangunan Desa untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.**
d) **Pembangunan Desa mengacu pada Pembangunan Kabupaten/Kota**

1. Desa berkedudukan di **wilayah Kabupaten/Kota.** (Pasal 5 UU 6 Tahun 2014)
2. Pemerintah Desa Menyusun perencanaan Pembangunan desa sesuai dengan **kewenangannya** dengan mengacu pada **Perencanaan Pembangunan Kab/Kota.** (Pasal 79 ayat (1) UU 3 Tahun 2024 tentang Desa)
3. Perencanaan Pembangunan Desa merupakan **salah satu sumber masukan** dalam **Perencanaan Pembangunan Kab/Kota.** (Pasal 79 ayat (1) UU 3 Tahun 2024 tentang Perub kedua atas UU 6 th 2014 tentang Desa)
4. Rancangan RPJM Desa memperhatikan arah **kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten/kota.** (Pasal 116 ayat (5) PP 43 Tahun 2014)

# AREA RISIKO DALAM IMPLEMENTASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

- Prinsip swakelola Pengadaan B/J
- Kewajiban Perpajakan
- Kades 'Powerfull'
- Masalah lainnya
  - Bencana alam/ Perampokan/ Tipikor

- Laporan yg hrs dibuat (Sms. I-Minggu I Bulan Juni dan Sms. II-Minggu ke IV Jan)
- Tatacara Pelaporan
- Publikasi kepada Masyarakat

PERENCANAAN → PELAKSANAAN → PENATA-USAHAAN → PELAPORAN → PTJWBN

- Konsistensi RPJMDesa, RKPDesa dan APBDesa
- Tingkat Partisipasi Masyarakat
- Kualitas RKP Desa
- Informasi Pagu Indikatif ADD dan DD
- Harmonisasi Kades & BPD
- Evaluasi APB Desa

- Administrasi pembukuan
- Cara peng-SPJ-an
- Pencatatan kekayaan desa
- Konsep 'Bel. Modal' & Bel. Barang/Jasa

- sebagai bagian dari Laporan Kepala Desa (Akhir Bulan Januari setelah akhir TA berkenaan)
- Laporan PJ:
  a) Laporan Ralisasi Pelaksanaan APBDesa.
  b) Laporan Kekayaan Milik Desa
  c) Laporan Program Pem dan Pemda ke Desa

# TANTANGAN DALAM IMPLEMENTASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

**INTERNAL DESA**

- Sumber-sumber pendapatan Desa yang harus dikelola dalam APBDesa
- Kapasitas SDM pengelola keuangan Desa masih terbatas;
- tingkat kesulitan geografis tiap desa bervariasi, mulai ringan, sedang dan berat;
- ketidak tepatan (sasaran, target, output, kebutuhan besaran anggaran) dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan dan anggaran;
- Keterbatasan sarana dan prasarana Kantor Desa; dan
- Integritas dan mentalitas Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- Kebutuhan simplifikasi dan sinergitas laporan, terutama DD – laporan yang sederhana, akuntabel, kejelasan data output )
- Timbulnya masalah pelanggaran hukum



# TANTANGAN DALAM IMPLEMENTASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

**EKSTERNAL DESA**

- Integritas dan mentalitas supra Desa;
- Kapasitas pemerintah supra Desa yang melaksanakan tugas binwas terbatas;
- Binwas yang dilakukan oleh Pemerintah, Gubernur dan Bupati/Wali Kota masih belum berjalan dengan optimal.
- Ketidaktersediaan perbup terkait pengelolaan keuangan Desa, pengadaan barang/jasa di Desa,
- Pendampingan masih belum optimal;
- Hambatan/permasalahan dalam pelaksanaan DD
- Tuntutan Desa (pengaturan Siltap, dan tunjangan)
- Implikasi kebijakan pemerintah lainnya (PKTD; SKB Pengawasan bersama DD)
- Peningkatan kompetensi pengelola keu desa tidak terjadwal secara jelas



# PERAN SISKEUDES DALAM PENGAWASAN DANA DESA

Pengendalian perencanaan :
Mengidentifikasi kegiatan dalam APBDes sesuai dengan RKPDes dan RPJMDes.

Pengendalian penganggaran :
Membantu menguji kesesuaian anggaran, sumber pendanaan, dan pagu belanja.

Pengawasan pelaksanaan :
Memantau realisasi kegiatan dan penggunaan anggaran dibandingkan dengan rencana.
Pengawasan pelaksanaan
Memantau realisasi kegiatan dan penggunaan anggaran dibandingkan dengan rencana.
Pengawasan pelaporan
Menyediakan laporan realisasi anggaran dan laporan pertanggungjawaban keuangan desa.

Deteksi dini penyimpangan
Membantu mengidentifikasi transaksi tidak wajar, ketidaksesuaian anggaran, dan indikasi penyimpangan.



# PENGHARGAAN TERHADAP SISKEUDES DARI PBB (*UNITED NATIONS PUBLIC SERVICE AWARD* 2026)




Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

Informasi Publik | Publikasi | Unit Kerja | Peraturan | PBJ | Tentang Kami | ID

## Siskeudes Raih Penghargaan Perserikatan Bangsa-Bangsa, BPKP Terima Pengakuan Global atas Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa




## Penghargaan PBB untuk Siskeudes Perkuat Komitmen Integrasi Tata Kelola Keuangan Desa

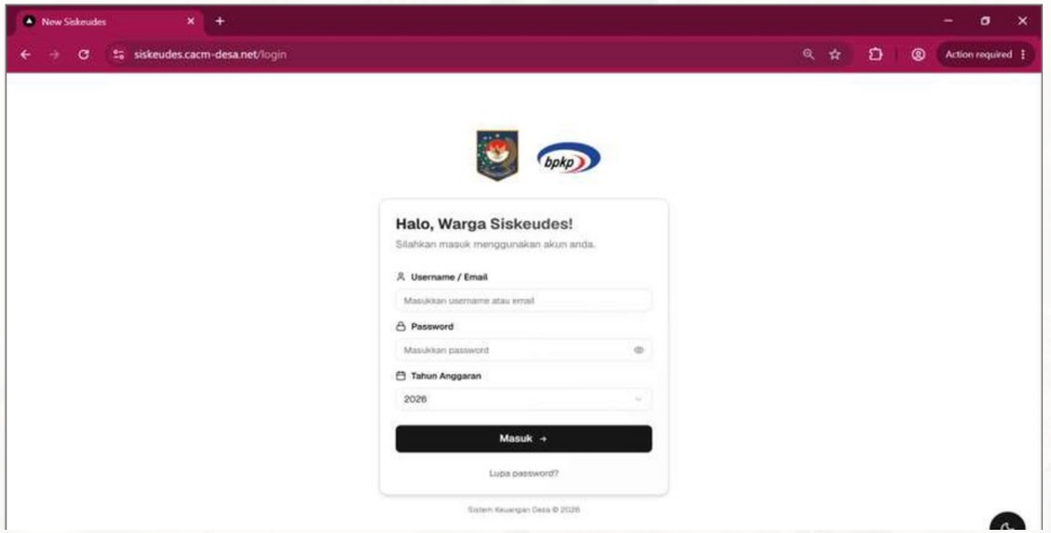
7 Juli 2026 | Pusat Penerangan | 86 views



**BPKP meraih pengakuan internasional melalui Siskeudes yang memperoleh predikat Honourable Mention pada UN Public Service Awards 2026 di Georgia. Diterapkan pada 75.265 desa di Indonesia, Siskeudes meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan keuangan desa serta memperkuat pencegahan kecurangan melalui digitalisasi dan pengawasan berbasis data. Capaian ini menegaskan kontribusi BPKP dalam mendukung tata kelola pemerintahan desa yang baik dan pencapaian SDGs.**

# Perkembangan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)
# MENUJU SISKEUDES WEB




## Existing Siskeudes

1. Berbasis desktop;
2. Database di desa (offline), dan di kab/kota (online);
3. Menghasilkan 85 jenis laporan, a.l.: RPJMDes, RKPDes, APBDes, BKU, LRA,LKMD, CaLK, dll;dan
4. Teknologi pemrograman: Delphi 7 (2007).

✔️Update V 2.0.9 R2, 5Mei 2025:
✔️ Tagging PenyertaanModal Desa
✔️ Mekanisme Deposit Pajak sesuai Coretax System
✔️ PKTD, dll

## Pengembangan Siskeudes Web saat ini

1. Berbasis web;
2. Pembaharuan teknologi systeminformasi (Next-JS)
3. Disediakan versi stand alone yg dapat disinkronisasi dgn: database online; Database MS SQL Server; dan Database terpusat di kab/kota, provinsi,nasional;
4. Memudahkan monitoring dan collecting data di tingkat nasional;
5. Memudahkan interoperability dengan aplikasi lain melalui API (Application Programming Interface);
6. Multi platform perangkat elektronik
7. Proses di tahap perencanaan lebih dilekatkan ke dalam aplikasi(RPJMDes – RKPDes – APBDes)

# Siskeudes Online Menuju CACM

***Continuous Auditing***
Evaluasi data secara otomatis dan berkelanjutan berbasis teknologi.

***Continuous Monitoring***
Pemantauan otomatis untuk menyalakan data terkini untuk kinerja, keputusan, dan risiko.



Identifikasi Redflag



Pengiriman Atensi

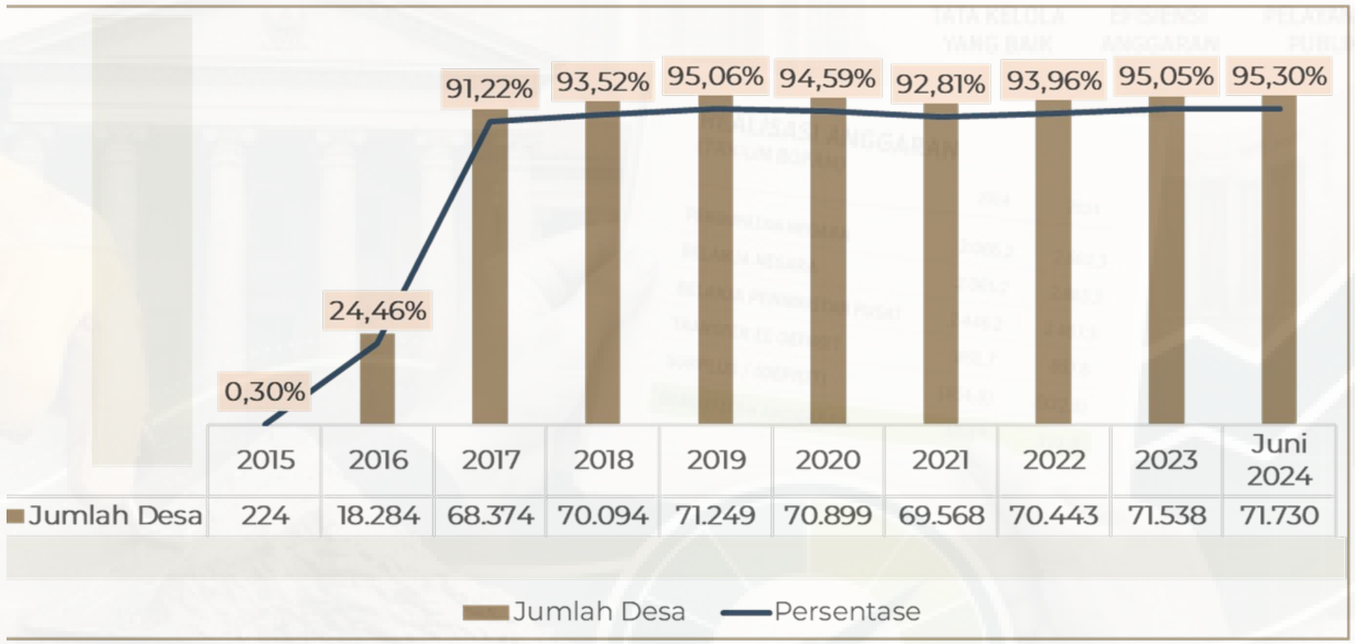


Monitoring TL

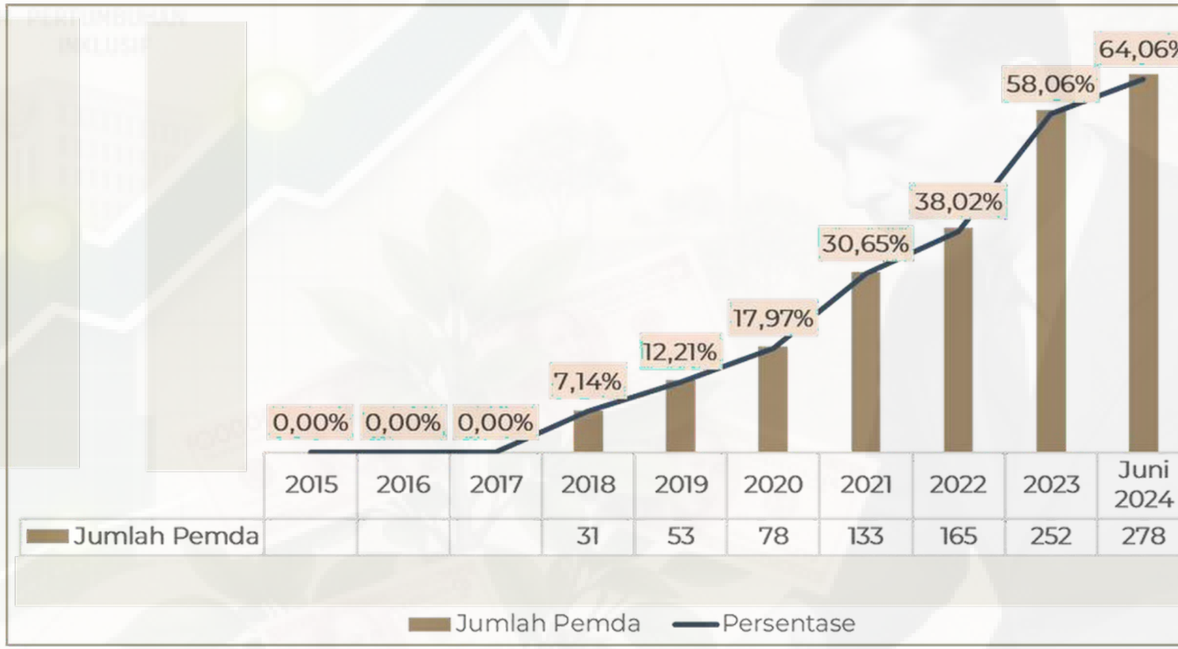


# PERKEMBANGAN SISKEUDES

## PERKEMBANGAN IMPLEMENTASI SISKEUDES




## PERKEMBANGAN IMPLEMENTASI SISKEUDES ONLINE









**Perkembangan Implementasi Siskeudes dari Tahun 2016 s.d. 2017 meningkat pesat didorong dengan Himbauan KPK kepada Kepala Desa untuk Implementasi Siskeudes. Implementasi Siskeudes *Online* menunjukkan tren positif dari tahun ke tahun.**



# PERKEMBANGAN SISKEUDES VERSI DESKTOP

**2015**
**Versi 1.0,**
Permendagri 113/2014

**2018**
**Versi 2.0,**
Penyesuaian dengan Permendagri 20/2018

**2019**
**Versi 2.0.1**
Support SQL Server Online

**2020**
**Versi 2.0.2**
Fitur Interoperabilitas dengan OmSpan;

**2021**
**Versi 2.0.3**
Penambahan Laporan BTT dan Realisasi BLT-DD untuk Desa

**2022**
**Versi 2.0.4**
Penambahan Fitur Export Data Konsolidasi APBDesa, versi 1.0

**2023**
**Versi 2.0.5**
Pengembangan siskeudes konsolidasi v.2, penambahan fitur Tagging Kegiatan, dan perbaikan-perbaikan bug

**2024**
**Versi 2.0.6**
Pengembangan guna mendukung Siskeudes link Transaksi Belanja dan tambahan fitur lainnya (penambahan isian tagging, perbaikan fitur, dll)

**2025**
**Versi 2.0.7**
**Tambahan Fitur dan Pengendalian Data**
(Laporan (BKU per Sumberdana, Laporan per Paket Kegiatan, Tambahan Tagging dan **Mapping tagging**, Fitur Pencarian SPP dan Penerima pada Kwitansi, dll)

**2026**
**Versi 2.0.8**
**Tambahan Fitur dan Pengendalian Data**
(pengisian link bukti kegiatan, daftar nominatif siltap, tunjangan per perangkat desa dan BPD, penutupan kas bulanan, dll)

**2026**
**Versi 2.0.9**
**Tambahan Fitur dan Perbaikan**
(Kirim Data ke SIKD Teman Desa untuk pencairan Dana Desa, Fitur Cek Permasalahan Database, Tambahan Fitur Monitoring dan perbaikan-perbaikan bugs)

# URAIAN UPDATE SISKEUDES V 2.0.9

Siskeudes V2.0 R2.0.9
Dirilis Februari 2026, untuk Database TA 2025 dan TA 2026

01. Menu Tools: Penambahan Fitur Kirim Data ke SIKD Teman Desa Kementerian Keuangan (Create Zip File dan Post API);
02. Menu Tools: Penambahan Fitur Cek Database untuk cek anomali data;
03. Menu Tools: Penambahan Monitoring Belanja Operasional 30%;
04. Menu Tools: Menu Monitoring apabila dibuka oleh user Kecamatan (Supervisor) maka yg tampil adalah desa-desa di kecamatan tsb;
05. Menu Tools: Penambahan ekspor dataset format excel untuk pengolahan data;
06. Menu Tools: Setting Konfigurasi, diberi opsi apakah buka kunci posting oleh Kecamatan atau oleh Admin Pemda;
07. Menu Tools: Setting Konfigurasi, diberi opsi apakah link bukti wajib diisi atau tidak;
08. Menu File: Perbaikan error ubah password;
09. Menu Penatausahaan: Penambahan jumlah karakter huruf nama penerima pada bukti pengeluaran;
10. Menu Penatausahaan: Perbaikan report Rekapitulasi SILTAP utk DB MS Access;
11. Menu Penatausahaan: Penambahan detail informasi pada report Pengembalian Belanja/Pembiayaan;
12. Menu Penatausahaan: Perbaikan Primary Key tabel Ta_TPBRinci;
13. Menu Penatausahaan: Penambahan Pengendalian Metode Pembayaran pada Penyetoran Pajak wajib diisi;
14. Menu Penatausahaan: Penambahan Fitur Search dan Filter pada saat memilih nama perangkat di isian Daftar Nominatif;
15. Menu Penatausahaan: Penambahan informasi tagging pada menu Pengembalian Pembiayaan;
16. Menu Penatausahaan: Perbaikan otomatisasi load bukti pengeluaran double saat memakai Daftar Nominatif;
17. Menu Pembukuan: Penambahan Fitur Ekspor Saldo Akhir untuk menjadi Saldo Awal Tahun berikutnya;
18. Menu Pembukuan: Perbaikan input saldo awal terkendala penutupan kas desa lain;

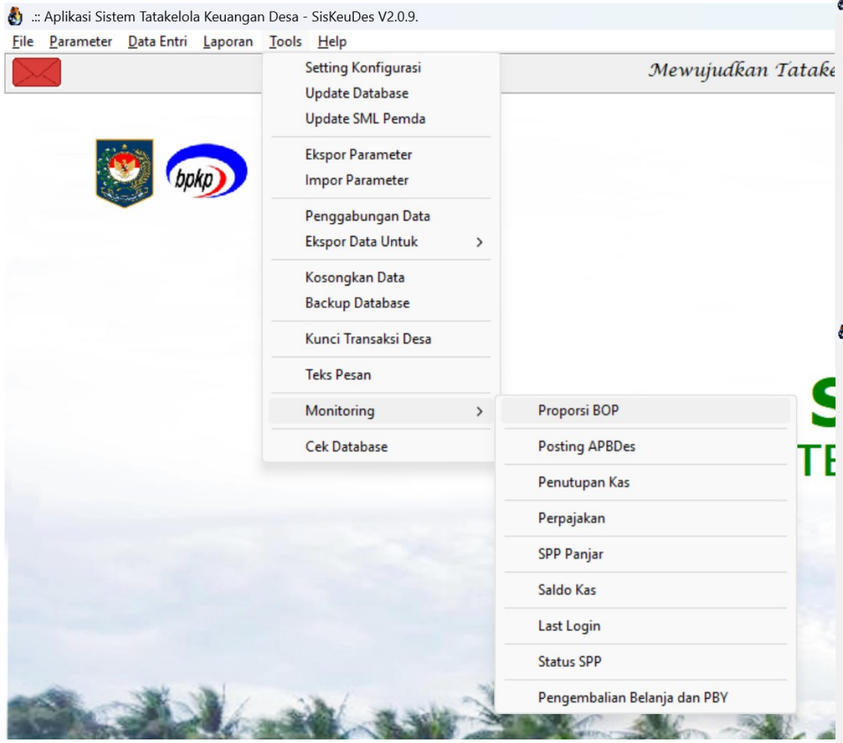
# URAIAN UPDATE SISKEUDES V 2.0.9

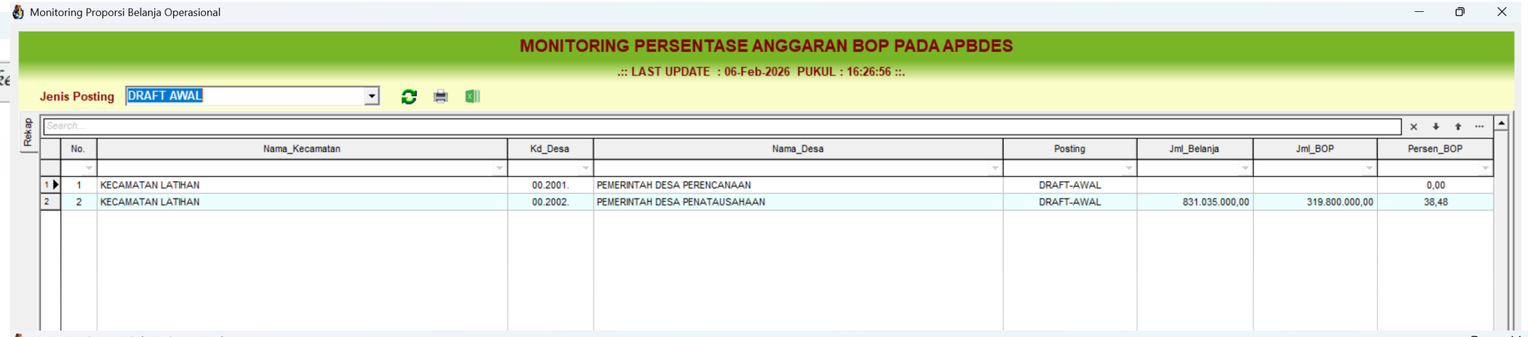
Siskeudes V2.0 R2.0.9
Dirilis Februari 2026, untuk Database TA 2025 dan TA 2026

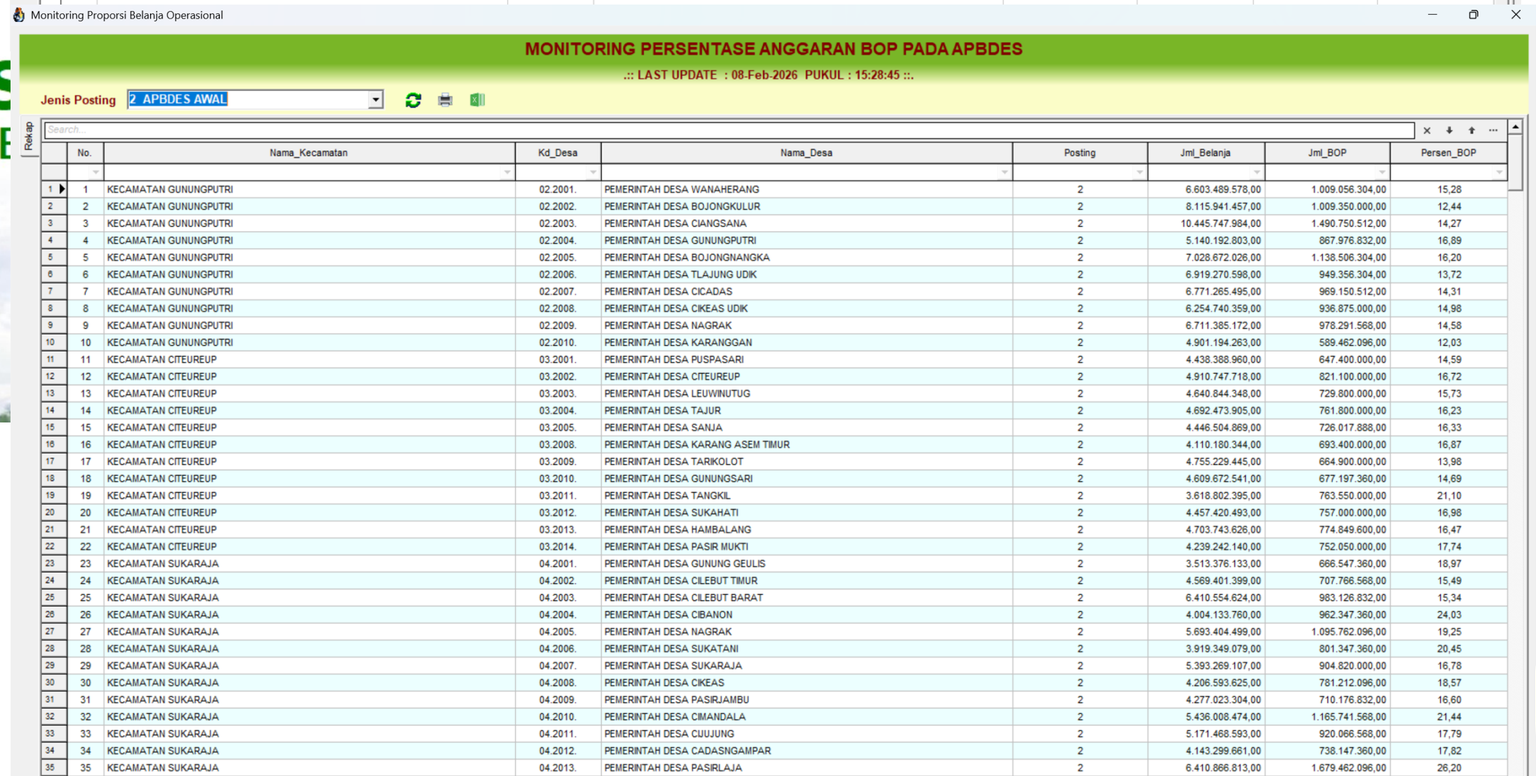
19. Menu Laporan Penganggaran: Penambahan pilihan Sumber Dana pada Laporan Rencana Anggaran Kas (RAK);
20. Menu Laporan Pertanggungjawaban: Perbaikan rumus lebih/kurang pada LRA;
21. Menu Laporan Pertanggungjawaban: Perbaikan Laporan Kekayaan Milik Desa (Pengaruh Pengembalian Pembiayaan);
22. Menu Laporan Pertanggungjawaban: Perbaikan Laporan Realisasi APBDes Per Sumberdana 1b, pada kolom Lebih/(Kurang);
23. Menu Laporan Pertanggungjawaban: Perbaikan Laporan Realisasi Tagging terkait Pengaruh Pengembalian Pembiayaan;
24. Menu Laporan Pertanggungjawaban: Perbaikan Laporan Rekapitulasi Realisasi Tagging terkait Pengaruh Pengembalian Pembiayaan;
25. Menu Laporan Kompilasi : Perbaikan Laporan Kompilasi Rekapitulasi Tagging terkait Pengaruh Pengembalian Pembiayaan;
26. Perbaikan form-form yang tidak bisa ditutup saat jaringan internet terputus;

# CONTOH UPDATE SISKEUDES V 2.0.9

## 03. Menu Tools: Penambahan Monitoring Belanja Operasional 30%;



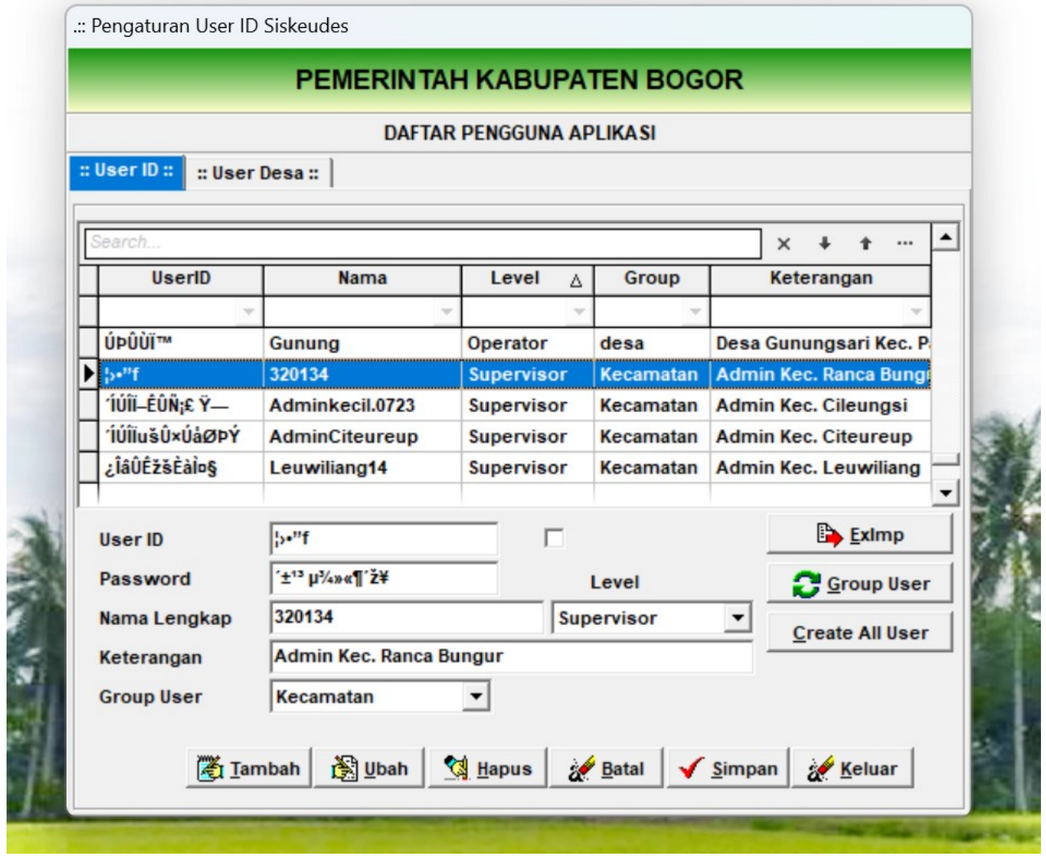



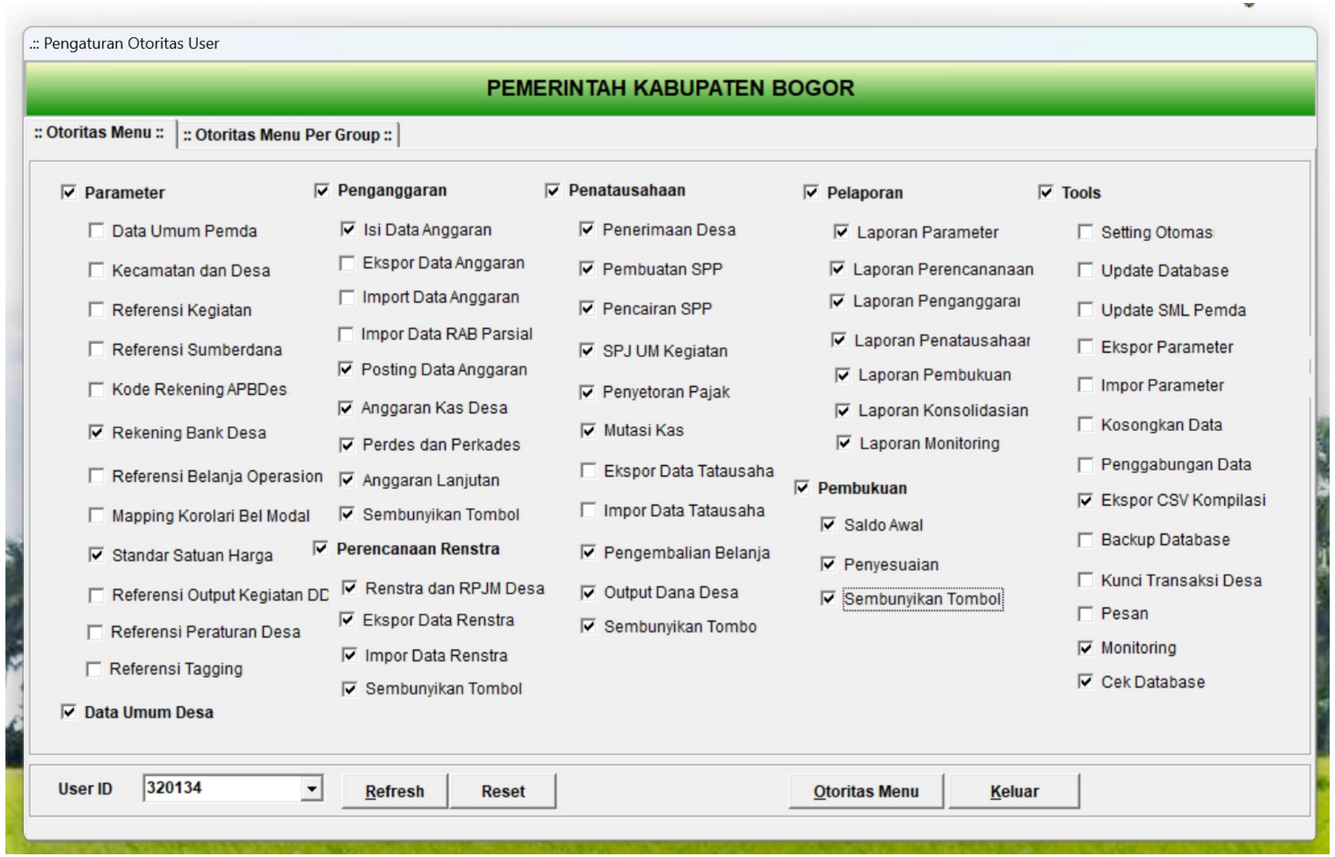

Masuk ke Menu Tools – Monitoring – Proporsi APBDes

Untuk melihat proporsi Belanja Operasional Tiap Desa

# CONTOH UPDATE SISKEUDES V 2.0.9

**04. Menu Tools: Menu Monitoring apabila dibuka oleh user Kecamatan (Supervisor) maka yg tampil adalah desa-desa di kecamatan tsb;**

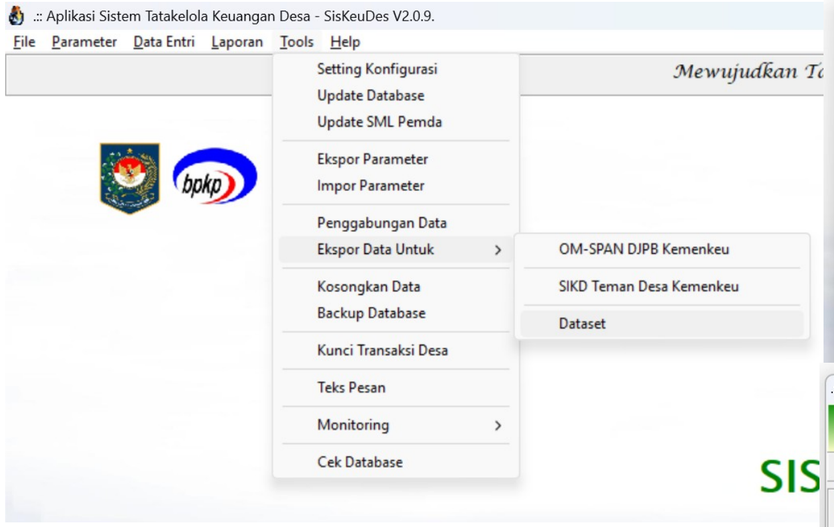



Contoh salah satu Kec di Kab Bogor, kita buka akses ke laporan Monitoring

# CONTOH UPDATE SISKEUDES V 2.0.9

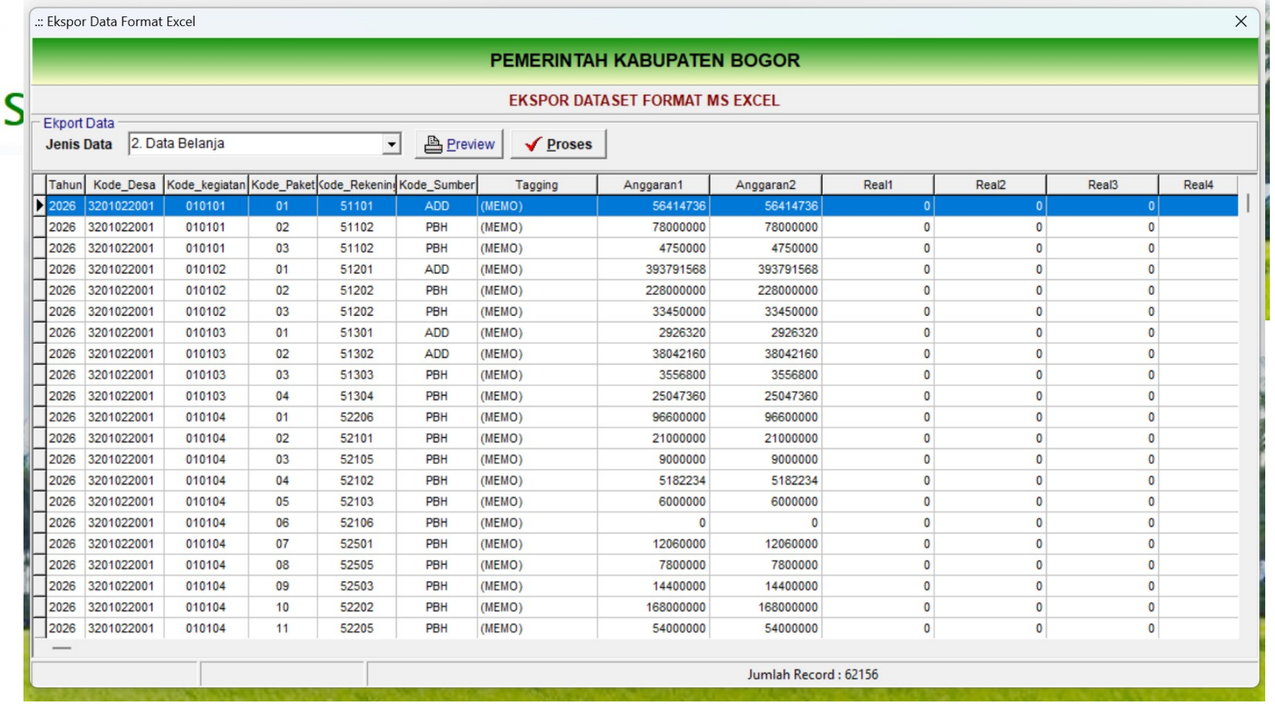
## 05. Menu Tools: Penambahan ekspor dataset format excel untuk pengolahan data;




Akses menu tools – ekspor data - Dataset

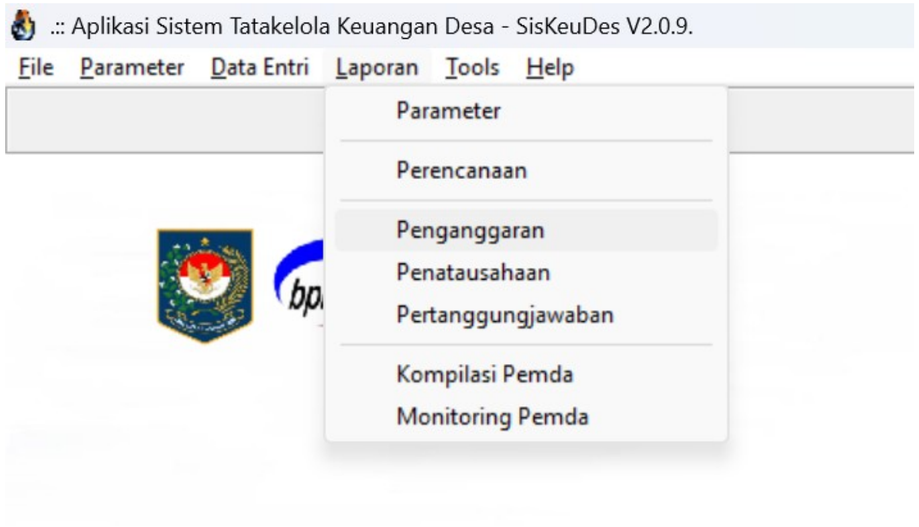


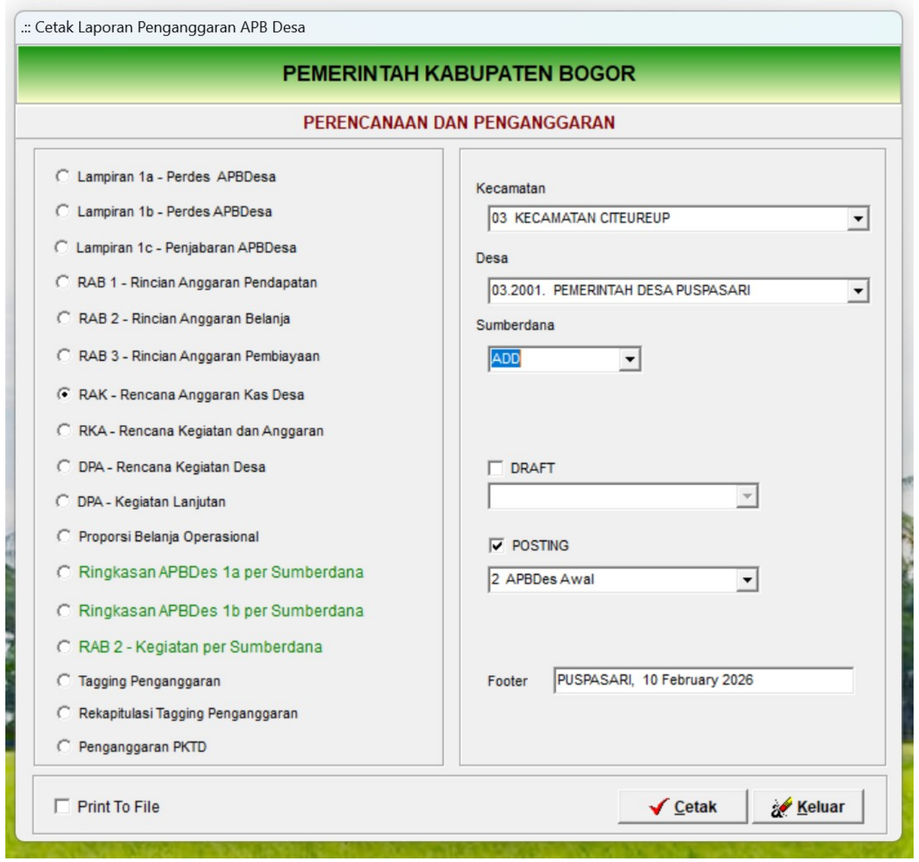

Pilih Data yang ingin di proses



# CONTOH UPDATE SISKEUDES V 2.0.9

**19. Menu Laporan Penganggaran: Penambahan pilihan Sumber Dana pada Laporan Rencana Anggaran Kas (RAK);**




cetakan RAK saat ini dapat difilter per sumber dana

# CONTOH UPDATE SISKEUDES V 2.0.9

## 22. Menu Laporan Pertanggungjawaban: Perbaikan Laporan Realisasi APBDes Per Sumberdana 1b, pada kolom Lebih/(Kurang);

Sumberdana : DDS Dana Desa (Dropping APBN) — Realisasi s.d 31/12/2025

| KODE REK | URAIAN | ANGGARAN ( Rp ) | REALISASI ( Rp ) | LEBIH/(KURANG) ( Rp ) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 05.01 | Sub Bidang Penanggulangan Bencana | 60.427.000,00 | 60.427.000,00 | 0,00 |
| 05.01.00. | Kegiatan Penanggulangan Bencana | 60.427.000,00 | 60.427.000,00 | 0,00 |
| 5.4. | Belanja Tidak Terduga | 60.427.000,00 | 60.427.000,00 | 0,00 |
| *5.4.1.* | *Belanja Tidak Terduga* | *60.427.000,00* | *60.427.000,00* | *0,00* |
| 5.4.1.01. | Belanja Tidak Terduga | 60.427.000,00 | 60.427.000,00 | 0,00 |
| 05.03 | Sub Bidang Keadaan Mendesak | 331.200.000,00 | 331.200.000,00 | 0,00 |
| 05.03.00. | Penanganan Keadaan Mendesak | 331.200.000,00 | 331.200.000,00 | 0,00 |
| 5.4. | Belanja Tidak Terduga | 331.200.000,00 | 331.200.000,00 | 0,00 |
| *5.4.1.* | *Belanja Tidak Terduga* | *331.200.000,00* | *331.200.000,00* | *0,00* |
| 5.4.1.01. | Belanja Tidak Terduga | 331.200.000,00 | 331.200.000,00 | 0,00 |
| | JUMLAH BELANJA | 1.773.980.840,00 | 1.773.979.200,00 | 1.640,00 |
| | SURPLUS / (DEFISIT) | 443.109.160,00 | 443.110.800,00 | (1.640,00) |
| 6. | PEMBIAYAAN | | | |
| 6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 308.840,00 | 308.840,00 | 0,00 |
| 6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 308.840,00 | 308.840,00 | 0,00 |
| 6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 443.418.000,00 | 343.418.000,00 | 100.000.000,00 |
| 6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 443.418.000,00 | 343.418.000,00 | 100.000.000,00 |
| | PEMBIAYAAN NETTO | (443.109.160,00) | (343.109.160,00) | (100.000.000,00) |
| | SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN | 0,00 | 100.001.640,00 | (100.001.640,00) |

WANAHERANG, 10 February 2026

KEPALA DESA

HERI SUDEWO, S.H

Rumus sudah diubah ke Anggaran dikurangi Realisasi

# CURRENT ISSUES DESA

## 01 KEMAJUAN DESA



Sebanyak 9.366 desa (12,44%) masih berstatus tertinggal dan sangat tertinggal.

## 02 KUALITAS HIDUP



Sekitar 5.000 desa masih menghadapi persoalan akses listrik.

## 03 KEMISKINAN DI DESA



Kemiskinan perdesaan September 2025 10,72%, lebih tinggi dari perkotaan 6,60%., Penduduk miskin perdesaan sekitar 12,18 juta jiwa.

## 04 KETAHANAN PANGAN



Ketahanan pangan masih menjadi prioritas DD 2026. Peta Ketahan Pangan nasional 2026 masih menunjukkan:
18 kabupaten/kota sangat rentan;
12 rentan;37 agak rentan;

## 05 AKUNTABILITAS, PBJ DAN PENGENDALIAN



Adanya Risiko penyimpangan dan lemahnya pengendalian pengelolaan keuangan desa.

## 06 KOPDES/KEL MP (KDKMP)



Tantangan bergeser dari legalitas ke kesiapan operasional dan keberlanjutan usaha.

## 07 KEMANDIRIAN FISKAL



Kemandirian fiskal desa masih rendah. Sekitar 96,9% pendapatan desa berasal dari pendapatan transfer, sementara Pendapatan Asli Desa masih sangat kecil.

## 08 DIGITALISASI DESA



Akses internet terbatas/*blankspot*, sementara kapasitas pemerintah desa dalam memanfaatkan teknologi untuk tata kelola, pelayanan publik, pengelolaan keuangan dan pengembangan ekonomi juga belum optimal.

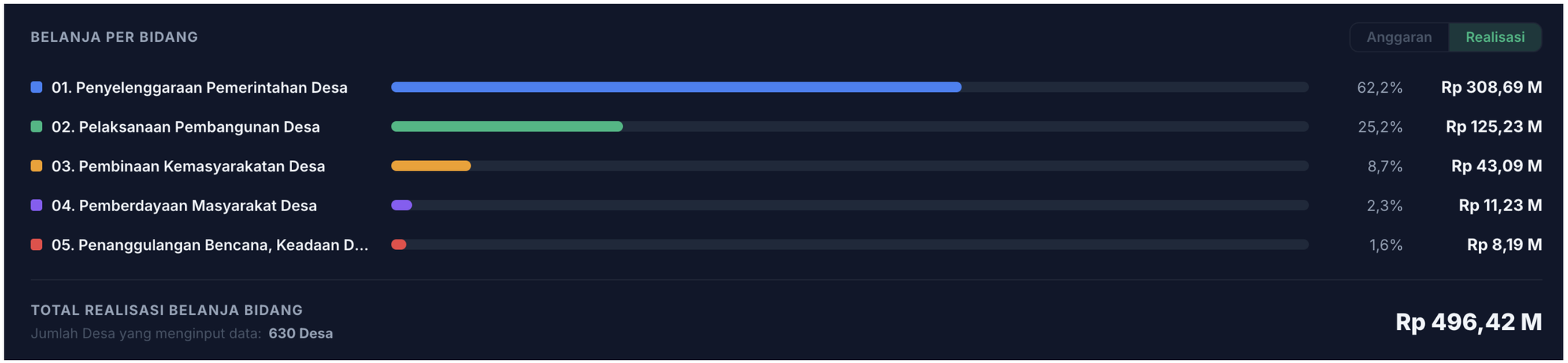
## 09 PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN



Perubahan struktur pendanaan menuntut penyesuaian APBDes.

# Potret Keuangan Belanja Desa per Bidang di Wilayah Provinsi Kalimantan Timur *(cut off 30 Mei 2026)*




**Dari total 840 Desa di 7 Kabupaten yang ada di Provinsi Kalimantan Timur, baru 630 Desa yang menginput data anggaran dan realisasi belanja per bidang di siskeudes, dengan posisi cut off database per 30 Mei 2026.**

***Sumber Data: Situwassa BPKP***

# HASIL PENGAWASAN TATA KELOLA KEUANGAN DESA TAHUN 2025 DAN TAHUN 2026

## Perencanaan

1. RPJMDes tidak menjadi acuan dalam pembuatan RKPDes dan APBDes serta belum sepenuhnya selaras dengan arah kebijakan pembangunan dalam RPJMD dan RPJMN.
2. Penyusunan RKPDes dan APBDes terlambat.
3. Kegiatan pemberdayaan masih didominasi pemberdayaan perangkat desa dibandingkan pemberdayaan masyarakat.
4. Musrembangdes hanya melibatkan segelintir masyarakat dan perangkat desa sehingga aspirasi masyarakat tidak optimal.



## Penganggaran dan Penetapan




1. Dana Desa untuk ketahanan pangan Tahun 2025 belum memenuhi ketentuan paling sedikit 20% sesuai Kepmendes PDT Nomor 3 Tahun 2025.
2. Desa masih belum melakukan penganggaran ketahanan pangan dengan mengoptimalkan BUMDes dan/atau BUMDesma sesuai Kepmendes PDT Nomor 3 Tahun 2025.
3. Penyusunan RAB belum didasarkan pada perhitungan kebutuhan dan estimasi biaya (HPS) yang wajar (belum dilakukan survei pasar, penyusunan desain teknis dan analisis kebutuhan)
4. Penganggaran kegiatan PKTD belum mengalokasikan upah tenaga kerja sekurang-kurangnya 50% dari total anggaran setiap paket kegiatan fisik.
5. Pemberian BLTDD belum berdasarkan data DTSEN.
6. SILPA tahun 2024 dengan SILPA yang dicatat di tahun 2025 tidak sinkron dan tidak sinkron juga dengan rekening bank.

# HASIL PENGAWASAN TATA KELOLA KEUANGAN DESA

## Pelaksanaan dan Pengadaan



1. Penarikan Dana Desa dilakukan sekaligus dan dikuasai secara tunai atau melalui rekening pribadi.
2. Pengeluaran dilakukan sebelum kegiatan atau pengadaan barang/jasa dilaksanakan.
3. Pengajuan pencairan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) terlambat.
4. Data DTSEN belum dipahami secara optimal oleh perangkat desa.
5. Belum seluruh BUMDesa berbadan hukum dan beroperasi secara optimal untuk memberikan kontribusi PADes.
6. Serah terima hasil PBJ belum didukung Berita Acara Serah Terima (BAST) yang memadai.
7. Desa belum menerapkan metode PBJ sesuai ketentuan berdasarkan berdasarkan batasan nilai belanja dan batasan pengadaan, baik melalui pembelian langsung maupun melalui proses penawaran.
8. Pelaksanaan PBJ di desa belum melibatkan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK).

## Penatausahaan



1. Desa belum melakukan rekonsiliasi saldo kas pada BKU Siskeudes dengan saldo kas tunai bendahara dan saldo rekening bank, sehingga terdapat ketidaksesuaian saldo kas.
2. Kas tunai yang dipegang oleh bendahara desa melebihi batas maksimal yang ditetapkan.
3. SPJ disusun setelah kegiatan selesai dan disesuaikan dengan angka pada Siskeudes, sehingga tidak mencerminkan realisasi belanja yang sebenarnya.
4. Penerbitan SPP belum didukung bukti pertanggungjawaban yang memadai.
5. Pencairan SPP dilakukan sebelum kegiatan dilaksanakan.
6. Pemotongan dan penyetoran pajak tidak sesuai ketentuan.
7. Penyetoran pajak terlambat dilakukan.
8. BLTDD tidak menggunakan SPP Panjar.
9. Desa tidak melakukan tutup buku setiap akhir bulan dan tidak melaporkannya kepada kepala desa.

# HASIL PENGAWASAN TATA KELOLA KEUANGAN DESA

## Pelaporan



1. Penyampaian laporan pelaksanaan APB Desa dan laporan realisasi kegiatan belum didukung bukti yang cukup.
2. Laporan realisasi kegiatan belum sepenuhnya mencerminkan kesesuaian antara pengeluaran riil atas pembangunan fisik dengan pencairan dana yang tercatat dalam Siskeudes.

## Pertanggungjawaban



1. Pertanggungjawaban belanja belum didukung bukti yang memadai.
2. Peran kecamatan dalam melakukan verifikasi dan evaluasi atas APBDes dan Laporan pertanggung jawaban APBDes tidak optimal.
3. Penggunaan SPJ panjar dan SPJ definitif belum tepat sesuai peruntukan dan ketentuan.

## Pengawasan & TL



1. Pendampingan oleh Pendamping Lokal Desa (PLD) belum sepenuhnya merata sesuai dengan kebutuhan desa.
2. Peran kecamatan sebagai evaluator dan pengawas terdekat di desa masih lemah.
3. Pembinaan oleh DPMD perlu diprioritaskan pada desa dengan kelemahan paling signifikan.
4. Belum terdapat progres pembentukan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) di Kabupaten Kutai Timur

# REKOMENDASI

## 0 PERENCANAAN



Memperkuat perencanaan dan penganggaran desa yang selaras dengan prioritas pembangunan, tepat waktu, peran evaluasi dan verifikasi kecamatan lebih optimal serta berorientasi pada pemberdayaan dan partisipasi

## 02 PENGANGGARAN DAN PENETAPAN



Memastikan kepatuhan alokasi anggaran, kewajaran RAB, pemenuhan upah PKTD, pemberdayaan BUMDes/BUMDesma, penyaluran BLT Desa berbasis DTSEN, dan rekonsiliasi SILPA

## 03 PELAKSANAAN DAN PENGADAAN



Menertibkan pengelolaan DD/ADD dan pencairannya, meningkatkan pemahaman DTSEN, mengoptimalkan BUMDes/BUMDesma, serta memastikan PBJ sesuai ketentuan dengan melibatkan TPK dan melengkapi BAST.

## 04 PENATAUSAHAAN



Meningkatkan ketertiban pengelolaan kas, penyusunan SPJ, pencairan dan penyetoran pajak, penggunaan SPP Panjar untuk BLTDD, serta tutup buku dan pelaporan bulanan.

## 05 PELAPORAN



Memastikan kelengkapan bukti pendukung, kesesuaian realisasi fisik dan keuangan dengan Siskeudes, serta rekonsiliasi BKU dengan rekening koran.

## 06 PERTANGGUNGJAWABAN



Memastikan validitas bukti pertanggungjawaban, ketepatan penggunaan SPJ Panjar dan definitif, serta mengoptimalkan evaluasi oleh kecamatan.

## 07 PENGAWASAN TINDAK LANJUT



Memeratakan pendampingan PLD, memperkuat pengawasan kecamatan, memprioritaskan pembinaan DPMD pada desa dengan permasalahan signifikan

**Memperkuat strategi melalui integrasi data lintas sumber untuk membangun sistem *early warning* yang mampu mengidentifikasi risiko pengelolaan keuangan desa secara lebih dini, akurat, dan terarah.**






# TERIMA KASIH